

PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Nurqomaru Zamani¹, Hasiholan Sihalo², Masayu Freya Dipra³, Indriany⁴, Abie Kurniawan⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,

² Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,

³ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Histori Artikel: Diajukan: Diperbaiki: Diterima:</p>	<p>Klausula baku yang merupakan bagian integral dari banyak perjanjian jual beli, secara esensial merujuk pada klausul-klausul yang telah ditetapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontrak tanpa adanya proses negosiasi khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Penerapan klausula baku dalam perjanjian jual beli menjadi relevan seiring dengan kompleksitas bisnis dan meningkatnya skala transaksi. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Untuk menjaga keadilan kontrak dan perlindungan konsumen, perlu adanya kerangka hukum yang kuat yang mengatur penggunaan klausula baku. Pengadilan perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan mereka tentang interpretasi dan penegakan klausula baku, serta memastikan bahwa keputusan tersebut menciptakan kepastian hukum yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Diperlukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur penggunaan klausula baku. Regulasi yang jelas dan ketat dapat membantu menghindari penyalahgunaan klausula baku dan memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi. Badan pengatur dan pemerintah perlu terus memantau dan meninjau regulasi tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan konsumen. Penting untuk meningkatkan transparansi dalam kontrak. Pelatihan dan informasi yang lebih baik tentang hak-hak konsumen, termasuk hak-hak terkait dengan klausula baku, dapat membantu konsumen untuk lebih percaya diri dalam memahami dan menegosiasikan kontrak. Perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum atau merugikan konsumen. Perlu ditingkatkan kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan, pemerintah, badan pengatur, dan masyarakat sipil.</p>
<p>Kata kunci: Klausula Baku, Perjanjian Jual Beli, Bisnis</p>	
<p>Keywords: Standard Clause, Sales and Purchase Agreement, Business</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>Standard clauses, which are an integral part of many sales and purchase agreements, essentially refer to clauses that have been previously determined and included in the contract without any special negotiation process between the parties involved. The application of standard clauses in sales and purchase agreements becomes relevant along with the complexity of business and the increasing scale of transactions. The author uses a type of library research, namely a series of activities related to library data collection methods. To maintain contract fairness and consumer protection, there needs to be a strong legal framework that regulates the use of standard clauses. Courts need to consider the long-term implications of their decisions on the interpretation and enforcement of standard clauses, and ensure that these decisions create balanced and fair legal certainty for all parties involved. A review and improvement of the regulations governing the use of standard clauses is needed. Clear and strict regulations can help avoid misuse of standard clauses and ensure that consumer rights remain protected. Regulatory bodies and governments need to continue to monitor and review these regulations in accordance with business developments and consumer needs. It is important to increase transparency in contracts. Better training and information on consumer rights, including rights related to standard clauses, can help consumers feel more confident in understanding and negotiating contracts. There is a need for strict enforcement of laws against practices that are unlawful or detrimental to consumers. There is a need for increased collaboration between stakeholders, including businesses, governments, regulatory bodies and civil society.</i></p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Klausula baku yang merupakan bagian integral dari banyak perjanjian jual beli, secara esensial merujuk pada klausul-klausul yang telah ditetapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontrak tanpa adanya proses negosiasi khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Fenomena ini, yang umumnya dikenal sebagai "ketentuan standar" atau "syarat-syarat umum," menjadi sebuah praktik yang lazim dalam berbagai sektor industri. Mulai dari transaksi sederhana seperti pembelian produk konsumen hingga kesepakatan bisnis yang rumit, klausula baku telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam berbagai perjanjian jual beli.¹

Pentingnya klausula baku dalam konteks transaksi bisnis modern tak dapat dipungkiri. Dalam lingkup bisnis yang semakin kompleks, klausula baku memainkan peran penting dalam memberikan kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Dengan menyediakan kerangka kerja yang sudah disepakati sebelumnya, klausula baku membantu mengurangi ketidakpastian dan potensi sengketa yang mungkin timbul selama eksekusi kontrak.²

Namun, di balik manfaatnya, penggunaan klausula baku juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Salah satunya adalah masalah keadilan kontrak. Karena klausula tersebut umumnya disusun oleh pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih besar, seperti perusahaan besar, ada kekhawatiran bahwa konsumen atau pihak-pihak yang lebih lemah secara ekonomi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atau bahkan memahami seluruh isi dari klausula-klausula tersebut.

Dalam era digital dan globalisasi, kompleksitas penggunaan klausula baku semakin meningkat. Transaksi online yang semakin dominan memunculkan pertanyaan baru tentang keabsahan dan keterbacaan klausula baku dalam kontrak elektronik. Selain itu, perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama, dengan pihak-pihak regulator dan hukum berusaha untuk menegakkan standar keadilan dan kesetaraan dalam perjanjian jual beli yang menggunakan klausula baku. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan bisnis dan hukum untuk terus mempertimbangkan implikasi dan evolusi dari penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang.

Penerapan klausula baku dalam perjanjian jual beli menjadi relevan seiring dengan kompleksitas bisnis dan meningkatnya skala transaksi. Dalam konteks globalisasi, perusahaan-perusahaan seringkali menggunakan klausula baku untuk menghadapi tantangan hukum dan bisnis yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Meskipun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam hubungan kontraktual, penggunaan klausula baku juga sering menimbulkan polemik terkait keadilan kontrak dan perlindungan konsumen.

Perkembangan teknologi dan ekonomi juga memberikan dampak signifikan terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian jual beli. Di era digital, transaksi online semakin dominan, yang mengarah pada peningkatan penggunaan syarat-syarat umum dalam perjanjian elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan kekuatan hukum klausula baku dalam konteks transaksi digital, serta tantangan dalam penegakan hak dan tanggung jawab antara pihak penjual dan pembeli.

Dalam konteks hukum, pengadilan memiliki tanggung jawab yang berat dalam menangani sengketa yang melibatkan klausula baku dalam perjanjian jual beli. Mereka dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan beragam pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Sementara di satu sisi, perlu ditegaskan perlindungan konsumen dan keadilan kontrak, di sisi lain, pengadilan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan komersial yang mendasari transaksi tersebut.

¹ Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).

² Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.

Perlindungan konsumen menjadi fokus utama dalam penafsiran dan penerapan klausula baku. Hal ini mengingat bahwa konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam negosiasi kontrak dibandingkan dengan pihak penjual atau perusahaan. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa klausula baku tidak memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang lebih kuat secara ekonomi, sambil tetap memastikan kejelasan dan konsistensi dalam perjanjian.

Selain itu, aspek keadilan kontrak juga menjadi pertimbangan penting. Klausula baku yang tidak wajar atau yang menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan antara pihak-pihak yang terlibat dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan. Ini berkaitan dengan prinsip bahwa sebuah kontrak seharusnya berdasarkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa adanya penyalahgunaan kekuatan negosiasi.

Namun, dalam menafsirkan klausula baku, pengadilan juga harus mempertimbangkan dinamika ekonomi dan komersial yang ada. Transaksi bisnis seringkali melibatkan risiko dan kompleksitas yang berbeda, dan klausula baku sering kali dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari risiko yang tidak terduga. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa interpretasi mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga realitas bisnis yang mendasari perjanjian.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang peran dan dampak klausula baku dalam perjanjian jual beli menjadi krusial bagi para penegak hukum dalam menangani isu-isu yang kompleks dan bervariasi di era kontemporer. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkelanjutan, pengadilan dapat memastikan perlindungan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis yang melibatkan klausula baku.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Klausula Baku terhadap Keadilan Kontrak

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli tidak hanya merupakan praktik umum tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap keadilan kontrak antara penjual dan pembeli. Klausula baku adalah klausa-klause standar yang telah dirumuskan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontrak tanpa adanya proses negosiasi khusus antara kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, klausula baku tersebut dirancang oleh pihak penjual atau pihak yang memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam keseimbangan kekuatan dan hak antara penjual dan pembeli.³

Dampak utama dari penggunaan klausula baku adalah potensi untuk merugikan atau merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Misalnya, klausula-klausula pembatasan tanggung jawab atau penyelesaian sengketa dapat menguntungkan penjual sementara merugikan pembeli. Pembeli mungkin tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk menegosiasikan atau menolak klausula-klausula tersebut, sehingga memungkinkan penjual untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang tidak adil atau merugikan. Selain itu, penggunaan

³ Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.

klausula baku juga dapat mempengaruhi kesetaraan akses terhadap informasi dan pengetahuan antara penjual dan pembeli. Klausula-klausula yang rumit atau tersembunyi dalam perjanjian dapat membuat pembeli kurang memahami hak-hak mereka atau risiko yang mereka ambil dalam transaksi tersebut. Ini dapat menyebabkan pembeli menyetujui ketentuan yang merugikan mereka tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya.⁴

Klausula baku juga dapat mengurangi kecenderungan untuk bernegosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika semua klausa standar sudah dimasukkan ke dalam kontrak sebelumnya, maka mungkin tidak ada ruang bagi penjual dan pembeli untuk bernegosiasi ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan perjanjian yang kurang fleksibel dan kurang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik masing-masing pihak. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli dapat merugikan pembeli dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam keadilan kontrak. Untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam transaksi bisnis, penting untuk mempertimbangkan ulang praktik penggunaan klausula baku dan memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua pihak terlindungi secara adil.⁵

Salah satu dampak utama dari penggunaan klausula baku adalah kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara penjual dan pembeli. Klausula baku sering kali dirumuskan oleh pihak penjual, yang memiliki kepentingan untuk melindungi diri mereka sendiri dan meminimalkan risiko dalam transaksi bisnis. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pembeli, terutama jika klausula-klausula tersebut merugikan mereka atau memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi penjual.

Selain itu, klausula baku juga dapat membatasi kemampuan pembeli untuk bernegosiasi atau mengubah ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak adil atau merugikan. Pembeli sering kali memiliki sedikit kekuatan tawar dalam proses negosiasi, terutama dalam transaksi besar atau di pasar yang didominasi oleh penjual. Dalam situasi ini, klausula baku dapat menjadi alat yang digunakan oleh penjual untuk memperkuat posisi mereka dan membatasi hak-hak pembeli.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua klausula baku secara otomatis merugikan pembeli. Beberapa klausula baku mungkin dirancang untuk melindungi kedua belah pihak atau untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak. Contohnya adalah klausula-klausula yang menetapkan batasan tanggung jawab atau penyelesaian sengketa. Dalam kasus-kasus tertentu, klausula baku dapat memfasilitasi transaksi yang efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk memastikan keadilan kontrak dalam penggunaan klausula baku, penting bagi pengadilan dan badan pengatur untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini termasuk memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur praktik bisnis yang wajar dan tidak adil, serta mempertimbangkan kepentingan konsumen dalam melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuatan pasar.

Dalam konteks hukum yang berkembang dan perubahan dinamika pasar, penting untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kerangka hukum yang mengatur penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli. Ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang ketat terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan atau norma-norma bisnis yang adil, serta dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan antara pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian, keadilan kontrak dapat dipertahankan dalam transaksi bisnis yang melibatkan penggunaan klausula baku.

⁴ Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).

⁵ Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(8), 1-15.

Klausula baku dalam perjanjian jual beli merujuk pada ketentuan standar yang dibuat oleh satu pihak, biasanya pihak yang lebih kuat (penjual), dan dipaksakan kepada pihak lain (pembeli) tanpa ruang negosiasi. Penggunaan klausula baku ini menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam kaitannya dengan keadilan kontrak antara penjual dan pembeli.

a. Dampak Positif:

- 1) Efisiensi dan Kepastian Hukum: Klausula baku dapat mempercepat proses transaksi dan menciptakan kepastian hukum bagi kedua pihak. Hal ini penting, terutama dalam transaksi massal, karena menghemat waktu dan tenaga dalam merundingkan setiap detail perjanjian.
- 2) Standarisasi dan Kualitas: Klausula baku dapat menstandarisasi kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, serta melindungi konsumen dari praktik curang oleh penjual. Contohnya, klausula tentang garansi produk dan batas waktu pengembalian barang.
- 3) Keteraturan Usaha: Klausula baku dapat menciptakan keteraturan dalam dunia usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menyusun perjanjian yang rumit.

b. Dampak Negatif:

- 1) Ketidakseimbangan Kekuatan: Klausula baku sering kali menguntungkan pihak penjual yang lebih kuat dan merugikan pembeli yang lebih lemah. Hal ini karena pembeli tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan persyaratan dan dipaksa untuk menerima kondisi yang telah ditentukan oleh penjual.
- 2) Potensi Ketidakadilan: Klausula baku dapat mengandung klausul yang tidak adil, seperti pembatasan tanggung jawab penjual yang berlebihan, pengecualian hak-hak konsumen, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak menguntungkan pembeli.
- 3) Kurangnya Transparansi: Klausula baku sering kali ditulis dengan bahasa yang rumit dan tidak mudah dipahami oleh pembeli awam. Hal ini dapat menyebabkan pembeli tidak mengetahui hak dan kewajibannya secara menyeluruh.

c. Upaya Meningkatkan Keadilan:

- 1) Peraturan Perundang-undangan: Diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat untuk melindungi konsumen dari klausula baku yang tidak adil. UU Perlindungan Konsumen di Indonesia telah mengatur tentang klausula baku, namun masih perlu diperkuat implementasinya.
- 2) Edukasi Konsumen: Penting untuk meningkatkan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka dan bagaimana memahami klausula baku. Konsumen harus berani membaca dan memahami isi klausula baku sebelum menandatangani perjanjian.
- 3) Negosiasi: Jika memungkinkan, pembeli harus mencoba menegosiasikan persyaratan klausula baku dengan penjual. Hal ini mungkin tidak selalu berhasil, tetapi patut dicoba untuk mendapatkan perjanjian yang lebih adil.
- 4) Alternatif Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa terkait klausula baku, konsumen dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli adalah fenomena yang kompleks dengan dampak yang dapat bersifat positif dan negatif terhadap keadilan kontrak antara penjual dan pembeli. Di satu sisi, klausula baku dapat memberikan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak, menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga kepastian bisnis. Misalnya, klausula-klausula standar mengenai pengembalian barang atau garansi produk dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dan memfasilitasi transaksi yang efisien.

Namun, di sisi lain, penggunaan klausula baku juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara penjual dan pembeli. Penjual yang lebih kuat secara ekonomi atau hukum dapat menanamkan klausula-klausula yang merugikan atau tidak adil bagi

pembeli yang lebih lemah. Ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak konsumen atau transaksi yang tidak seimbang, merugikan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli dilakukan secara adil dan tidak merugikan. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan klausula baku dengan membuat regulasi yang jelas dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara penjual dan pembeli serta memastikan perlindungan konsumen yang memadai.

Di samping itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan klausula baku dengan bijak dan bertanggung jawab. Penjual harus memastikan bahwa klausula-klausula yang mereka gunakan adil dan transparan, memberikan informasi yang cukup kepada pembeli, dan memberikan ruang untuk bernegosiasi jika diperlukan. Sikap ini dapat membantu membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen.

Keterlibatan konsumen juga sangat penting dalam menjaga keadilan dalam transaksi jual beli. Konsumen perlu lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam transaksi bisnis. Pendidikan konsumen tentang hak-hak mereka, keterbukaan untuk bertanya, dan kesediaan untuk mencari alternatif jika merasa tidak puas adalah langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa klausula baku digunakan dengan benar dan tidak merugikan. Dengan demikian, hanya melalui upaya kolektif dari pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, klausula baku dalam perjanjian jual beli dapat digunakan secara adil dan efektif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Dampak Klausula Baku terhadap Perlindungan Konsumen

Penerapan klausula baku dalam konteks transaksi jual beli membawa implikasi yang besar terhadap perlindungan konsumen. Klausula baku, sebagai bagian dari perjanjian tanpa melalui proses negosiasi langsung, dapat memberikan keuntungan atau merugikan pihak konsumen, tergantung pada isi dan penafsiran klausula tersebut. Sementara tujuan klausula baku sering kali adalah untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam perjanjian, dampaknya terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen perlu dipertimbangkan secara cermat.⁶

Salah satu dampak utama dari penerapan klausula baku adalah potensi untuk mengurangi tingkat perlindungan konsumen. Beberapa klausula baku mungkin dirancang untuk melindungi kepentingan penjual atau perusahaan dengan cara yang merugikan konsumen. Misalnya, klausula-klausula pembatasan tanggung jawab atau penyelesaian sengketa sering kali memberikan keuntungan lebih besar kepada penjual daripada kepada konsumen, sehingga merugikan hak-hak mereka. Selain itu, klausula baku juga dapat membingungkan atau bahkan menyesatkan konsumen tentang hak-hak mereka. Bahasa yang rumit atau tersembunyi dalam klausula baku dapat membuat konsumen kesulitan memahami sepenuhnya hak-hak mereka atau risiko yang mereka hadapi dalam transaksi tersebut. Akibatnya, konsumen mungkin tidak menyadari implikasi sebenarnya dari perjanjian yang mereka buat, meningkatkan risiko penyalahgunaan atau eksploitasi.⁷

Penggunaan klausula baku juga dapat membatasi kemampuan konsumen untuk menegosiasikan atau mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dalam kontrak. Terutama jika konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah, seperti dalam transaksi besar atau di pasar

⁶ Dewi, M. N. K. (2017). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 72-90.

⁷ Putri, D. K. (2017). Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas. *Jurnal Akta*, 4(4), 623-634.

yang didominasi oleh penjual, mereka mungkin merasa sulit untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Klausula baku dapat menjadi alat bagi penjual untuk memperkuat posisi mereka dan mengabaikan preferensi atau kebutuhan khusus konsumen. Perlindungan konsumen dalam konteks penggunaan klausula baku merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Penting bagi regulator dan badan pengawas untuk memastikan bahwa klausula baku tidak secara tidak adil merugikan konsumen atau melanggar hak-hak mereka. Selain itu, pendidikan konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi jual beli, serta keberlanjutan dari kerangka hukum yang mengatur penggunaan klausula baku, juga penting untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Salah satu dampak utama dari penggunaan klausula baku adalah potensi untuk mengurangi tingkat perlindungan konsumen. Klausula-klausula tersebut sering kali dirancang untuk melindungi kepentingan penjual atau perusahaan, seringkali pada biaya hak-hak konsumen. Misalnya, klausula-klausula pembatasan tanggung jawab atau klausula-klausula penyelesaian sengketa dapat membatasi kemampuan konsumen untuk menuntut ganti rugi atau mendapatkan keadilan di hadapan hukum.

Selain itu, klausula baku juga dapat membingungkan atau bahkan menyesatkan konsumen tentang hak-hak mereka. Klausula-klausula yang rumit atau tersembunyi dalam perjanjian dapat membuat konsumen tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka atau risiko yang mereka hadapi dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen menyetujui ketentuan yang merugikan mereka tanpa menyadari konsekuensinya.

Penggunaan klausula baku juga dapat membatasi kemampuan konsumen untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam kontrak. Dalam banyak kasus, konsumen memiliki kekuatan tawar yang lebih rendah dibandingkan dengan penjual, terutama dalam transaksi besar atau di pasar yang didominasi oleh penjual. Klausula baku dapat menjadi alat bagi penjual untuk memperkuat posisi mereka dan mengabaikan preferensi atau kebutuhan khusus konsumen.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua penggunaan klausula baku merugikan konsumen. Beberapa klausula standar dapat memberikan kejelasan dan konsistensi dalam transaksi bisnis, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Contohnya adalah klausula-klausula yang menetapkan garansi produk atau kebijakan pengembalian barang yang jelas dan mudah dipahami.

Untuk melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan klausula baku, perlu adanya kerangka hukum yang kuat yang mengatur penggunaannya. Ini termasuk persyaratan tentang transparansi, di mana klausula baku harus ditampilkan dengan jelas kepada konsumen sebelum mereka menandatangani kontrak, serta persyaratan tentang kesesuaian dan kepatuhan dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran konsumen juga penting dalam memitigasi dampak negatif dari klausula baku. Konsumen yang lebih terinformasi dan sadar hak-hak mereka akan lebih mampu mengidentifikasi klausula-klausula yang merugikan dan berpotensi untuk menolak atau menegosiasikan kontrak yang lebih menguntungkan bagi mereka.

Dengan demikian, dalam konteks transaksi jual beli, penerapan klausula baku memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan konsumen. Penting bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, pengadilan, dan badan pengawas konsumen, untuk memastikan bahwa penggunaan klausula baku tidak merugikan konsumen atau melanggar hak-hak mereka.

Klausula baku dalam perjanjian jual beli memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan konsumen. Di satu sisi, klausula baku dapat membantu melindungi konsumen dengan memastikan standar kualitas barang dan jasa, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi. Di sisi lain, klausula baku juga dapat berpotensi merugikan konsumen jika tidak disusun dan diterapkan dengan cermat.

a. Dampak Positif

- 1) Standarisasi Kualitas: Klausula baku dapat menstandarisasi kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen terhindar dari produk atau layanan yang tidak memenuhi standar minimum. Hal ini penting, terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan.
 - 2) Kepastian Hukum: Klausula baku dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal ini meminimalisir risiko perselisihan di kemudian hari, karena hak dan kewajiban kedua pihak telah tercantum dengan jelas dalam perjanjian.
 - 3) Efisiensi Transaksi: Klausula baku dapat mempercepat proses transaksi jual beli, terutama dalam transaksi massal. Hal ini karena pembeli tidak perlu menegosiasikan setiap detail perjanjian, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
- b. Dampak Negatif:
- 1) Ketidakseimbangan Kekuatan: Klausula baku sering kali disusun oleh pihak penjual yang lebih kuat, tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pembeli. Hal ini dapat menyebabkan klausula yang tidak adil dan merugikan konsumen, seperti pembatasan tanggung jawab penjual yang berlebihan, pengecualian hak-hak konsumen, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak menguntungkan pembeli.
 - 2) Kurangnya Transparansi: Klausula baku sering kali ditulis dengan bahasa yang rumit dan tidak mudah dipahami oleh konsumen awam. Hal ini dapat menyebabkan konsumen tidak mengetahui hak dan kewajibannya secara menyeluruh, sehingga rentan dieksploitasi oleh penjual yang tidak bertanggung jawab.
 - 3) Potensi Penyalahgunaan: Klausula baku dapat disalahgunakan oleh penjual untuk menipu atau mengecoh konsumen. Contohnya, penjual dapat menyembunyikan informasi penting dalam klausula yang panjang dan rumit, atau menggunakan bahasa yang membingungkan untuk mengelabui konsumen.
- c. Upaya Meningkatkan Perlindungan Konsumen
- 1) Peraturan Perundang-undangan: Diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat untuk melindungi konsumen dari klausula baku yang tidak adil. UU Perlindungan Konsumen di Indonesia telah mengatur tentang klausula baku, namun masih perlu diperkuat implementasinya.
 - 2) Edukasi Konsumen: Penting untuk meningkatkan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka dan bagaimana memahami klausula baku. Konsumen harus berani membaca dan memahami isi klausula baku sebelum menandatangani perjanjian.
 - 3) Pemanfaatan Teknologi: Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu konsumen memahami klausula baku dengan lebih mudah. Contohnya, dengan mengembangkan aplikasi yang dapat menerjemahkan klausula baku ke dalam bahasa yang lebih sederhana, atau menyediakan platform untuk konsumen untuk melaporkan klausula baku yang tidak adil.
 - 4) Pengawasan Pasar: Diperlukan pengawasan pasar yang lebih ketat untuk memastikan bahwa penjual tidak menggunakan klausula baku yang tidak adil. Badan Pengawas Perlindungan Konsumen dan Keamanan Makanan (BPK POM) dan lembaga terkait lainnya harus aktif dalam melakukan patroli dan menindak penjual yang melanggar peraturan.

Penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli adalah isu yang kompleks dengan dampak yang beragam terhadap perlindungan konsumen. Di satu sisi, klausula baku dapat memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga kepastian transaksi dan memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak. Misalnya, klausula-klausula yang mengatur garansi produk atau pengembalian barang dapat memberikan perlindungan tambahan bagi

konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapan mereka.

Namun, di sisi lain, penggunaan klausula baku juga dapat memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada penjual atau pihak yang lebih kuat dalam transaksi. Klausula-klausula yang tidak jelas atau merugikan secara substansial bagi konsumen dapat ditanamkan dalam perjanjian tanpa adanya kesempatan bagi konsumen untuk bernegosiasi atau menolak. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak konsumen atau transaksi yang tidak adil.

Oleh karena itu, upaya kolektif dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa klausula baku digunakan secara adil dan tidak merugikan konsumen. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur penggunaan klausula baku melalui pembuatan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.

Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan klausula baku dengan bijak dan bertanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa klausula-klausula yang mereka gunakan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keterbukaan untuk menerima umpan balik dari konsumen dan keterlibatan dalam proses penyelesaian sengketa juga penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara penjual dan pembeli.

Di samping itu, konsumen juga memiliki peran dalam menjaga perlindungan diri mereka sendiri dalam transaksi jual beli. Mereka perlu lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, termasuk hak untuk menolak klausula baku yang tidak adil atau merugikan. Keterlibatan aktif dalam proses pembelian, seperti meminta penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan kontrak atau mencari alternatif jika merasa tidak puas, juga dapat membantu memastikan bahwa konsumen dilindungi dengan baik dalam setiap transaksi.

3. Dampak Interpretasi dan Penegakan Klausula Baku oleh Pengadilan

Interpretasi dan penegakan klausula baku oleh pengadilan adalah aspek krusial dalam menentukan dinamika bisnis dan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli. Klausula baku, yang diintegrasikan tanpa proses negosiasi langsung, sering menjadi fokus sengketa di pengadilan karena dampaknya yang signifikan terhadap hak dan kewajiban pihak yang terlibat.⁸

Cara pengadilan menafsirkan klausula baku dapat memiliki konsekuensi yang luas terhadap operasi bisnis. Keputusan pengadilan tentang validitas, interpretasi, dan penegakan klausula baku dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan dan praktik kontrak mereka. Misalnya, jika pengadilan cenderung memberikan kekuatan hukum yang lebih besar kepada klausula baku, hal ini mungkin memberi penjual kepercayaan lebih besar untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sebaliknya, jika pengadilan lebih cenderung melindungi kepentingan pembeli dengan ketat, penjual mungkin perlu menyesuaikan praktik bisnis mereka agar tetap mematuhi standar hukum yang ditetapkan.

Selain itu, cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan klausula baku juga berdampak pada kepastian hukum dalam perjanjian jual beli. Keputusan pengadilan yang konsisten dan dapat diprediksi tentang klausula baku menciptakan kerangka hukum yang stabil, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk merencanakan dan melaksanakan transaksi mereka dengan keyakinan. Namun, ketidakpastian hukum dapat terjadi jika interpretasi dan penegakan klausula baku bervariasi antara kasus-kasus atau yurisdiksi, menyebabkan kesulitan dalam menentukan hak dan kewajiban yang sesuai.⁹

⁸ Aprilia, U. (2018). *Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyār (Studi Kasus di Toko Swalayan Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

⁹ Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).

Pengadilan juga memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi jual beli. Penafsiran yang cermat dan penegakan yang adil terhadap klausula baku dapat membantu menjaga keseimbangan kekuatan antara penjual dan pembeli, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

Dengan demikian, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan mereka tentang interpretasi dan penegakan klausula baku. Hanya dengan menjaga konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan sengketa yang melibatkan klausula baku, pengadilan dapat memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, adil, dan berkeadilan.

Salah satu dampak utama interpretasi klausula baku oleh pengadilan adalah terhadap dinamika bisnis. Keputusan pengadilan tentang validitas atau penafsiran klausula baku dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan dan praktik kontrak mereka. Misalnya, jika sebuah klausula baku dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan praktik bisnis mereka atau merancang klausula yang lebih jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, cara pengadilan menegakkan klausula baku juga dapat mempengaruhi hubungan antara pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Jika pengadilan cenderung memberikan kekuatan hukum kepada klausula baku, penjual mungkin merasa lebih percaya diri dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang mereka tentukan dalam kontrak. Di sisi lain, jika pengadilan cenderung melindungi kepentingan pembeli dengan lebih ketat, penjual mungkin merasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan klausula baku agar tetap mematuhi hukum dan menghindari sengketa hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan penegakan klausula baku oleh pengadilan juga berdampak pada kepastian hukum dalam perjanjian jual beli. Keputusan pengadilan yang konsisten dan dapat diprediksi tentang klausula baku dapat membantu menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari sengketa hukum yang tidak perlu.

Di sisi lain, jika interpretasi dan penegakan klausula baku oleh pengadilan cenderung bervariasi atau tidak konsisten, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ketidakpastian hukum dapat menghambat pertumbuhan bisnis, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan bahkan meningkatkan risiko sengketa hukum yang mahal dan merugikan.

Dengan demikian, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan mereka tentang interpretasi dan penegakan klausula baku dalam perjanjian jual beli. Pengadilan perlu memastikan bahwa keputusan mereka menciptakan kepastian hukum yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini dapat dilakukan melalui analisis yang cermat tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta melalui dialog dengan pemangku kepentingan bisnis dan konsumen untuk memahami dampak dari keputusan mereka. Dengan demikian, pengadilan dapat memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Klausula baku, ketentuan standar yang dibuat oleh satu pihak dan dipaksakan kepada pihak lain dalam perjanjian jual beli, memiliki peran penting dalam dinamika bisnis dan kepastian hukum. Interpretasi dan penegakan klausula baku oleh pengadilan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kedua aspek tersebut.

a. **Dampak terhadap Dinamika Bisnis:**

- 1) Kejelasan Aturan: Interpretasi klausula baku yang jelas dan konsisten oleh pengadilan dapat memberikan kejelasan aturan bagi pelaku bisnis, sehingga mereka dapat lebih mudah dalam menyusun perjanjian dan menjalankan aktivitas komersialnya.

- 2) Prediktabilitas Hukum: Penegakan klausula baku yang konsisten oleh pengadilan dapat meningkatkan prediktabilitas hukum dalam perjanjian jual beli. Hal ini memungkinkan pelaku bisnis untuk lebih mudah dalam memperkirakan risiko dan konsekuensi dari tindakannya.
 - 3) Efisiensi Transaksi: Interpretasi dan penegakan klausula baku yang efisien dapat mempercepat proses transaksi jual beli. Hal ini karena pelaku bisnis tidak perlu khawatir akan perselisihan hukum yang berkepanjangan terkait klausula baku dalam perjanjian.
- b. **Dampak terhadap Kepastian Hukum:**
- 1) Perlindungan Hak Konsumen: Interpretasi klausula baku yang berpihak pada konsumen dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem hukum dan mendorong mereka untuk melakukan transaksi jual beli dengan lebih aman.
 - 2) Keadilan Kontrak: Penegakan klausula baku yang adil dan tidak memihak dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak dalam perjanjian jual beli terlindungi dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan mendorong para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati.
 - 3) Kepastian Peradilan: Interpretasi dan penegakan klausula baku yang konsisten oleh pengadilan dapat meningkatkan kepastian peradilan. Hal ini berarti bahwa pelaku bisnis dapat lebih mudah dalam memprediksi hasil dari perselisihan hukum terkait klausula baku.
- c. **Tantangan**
- 1) Ketidakjelasan Klausula Baku: Interpretasi klausula baku yang tidak jelas dan tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan hukum yang berkepanjangan dan menghambat dinamika bisnis.
 - 2) Kekurangan Preseden: Kekurangan preseden terkait interpretasi dan penegakan klausula baku dapat membuat pengadilan kesulitan dalam mengambil keputusan yang adil dan konsisten. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kepastian peradilan.
 - 3) Penyalahgunaan Kekuatan: Klausula baku dapat disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat untuk merugikan pihak yang lebih lemah. Hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan menghambat dinamika bisnis yang sehat.
- d. **Upaya Meningkatkan Dampak Positif**
- 1) Pengembangan Hukum: Diperlukan pengembangan hukum yang lebih komprehensif terkait klausula baku. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas definisi klausula baku, mengatur batasan-batasan penggunaan klausula baku, dan memperkuat mekanisme perlindungan konsumen.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Pengadilan: Diperlukan peningkatan kapasitas pengadilan dalam menangani perkara terkait klausula baku. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada hakim dan petugas pengadilan tentang interpretasi dan penegakan klausula baku.
 - 3) Peningkatan Edukasi Konsumen: Diperlukan peningkatan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka terkait klausula baku. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada konsumen tentang cara memahami dan menegosiasikan klausula baku.

Interpretasi dan penegakan klausula baku oleh pengadilan memiliki peran penting dalam dinamika bisnis dan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli. Upaya untuk meningkatkan

interpretasi dan penegakan klausula baku yang jelas, konsisten, dan adil dapat memberikan manfaat bagi pelaku bisnis dan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Penting untuk memahami bahwa penggunaan klausula baku bukanlah hal yang sepenuhnya merugikan atau menguntungkan. Sementara beberapa klausula baku dapat memberikan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, yang lain mungkin merugikan satu pihak tertentu, terutama konsumen yang lebih lemah secara ekonomi.

Untuk menjaga keadilan kontrak dan perlindungan konsumen, perlu adanya kerangka hukum yang kuat yang mengatur penggunaan klausula baku. Pengadilan perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan mereka tentang interpretasi dan penegakan klausula baku, serta memastikan bahwa keputusan tersebut menciptakan kepastian hukum yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kesadaran konsumen dan pendidikan tentang hak-hak mereka juga penting dalam memitigasi dampak negatif dari klausula baku. Konsumen yang lebih terinformasi akan lebih mampu mengidentifikasi klausula-klausula yang merugikan dan berpotensi untuk menolak atau menegosiasikan kontrak yang lebih menguntungkan bagi mereka.

Dengan demikian, penggunaan dan penafsiran klausula baku dalam perjanjian jual beli merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Hanya dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini dengan seksama, baik dari sudut pandang hukum, bisnis, maupun konsumen, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

E. SARAN

Sebagai saran, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki penggunaan dan penafsiran klausula baku dalam perjanjian jual beli guna menjaga keadilan kontrak dan perlindungan konsumen.

1. Diperlukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur penggunaan klausula baku. Regulasi yang jelas dan ketat dapat membantu menghindari penyalahgunaan klausula baku dan memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi. Badan pengatur dan pemerintah perlu terus memantau dan meninjau regulasi tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan konsumen.
2. Penting untuk meningkatkan transparansi dalam kontrak. Penjual harus secara jelas dan jujur mengkomunikasikan klausula baku kepada konsumen sebelum mereka menandatangani kontrak. Ini akan membantu konsumen untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik, serta menghindari kebingungan atau ketidakpastian yang mungkin timbul.
3. Pendidikan konsumen harus ditingkatkan. Pelatihan dan informasi yang lebih baik tentang hak-hak konsumen, termasuk hak-hak terkait dengan klausula baku, dapat membantu konsumen untuk lebih percaya diri dalam memahami dan menegosiasikan kontrak. Ini juga dapat membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan klausula baku oleh penjual yang tidak etis.
4. Perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum atau merugikan konsumen. Pengadilan perlu mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan klausula baku dan memastikan bahwa keadilan kontrak ditegakkan. Ini akan memberikan sinyal yang kuat kepada industri bahwa pelanggaran hak konsumen tidak akan ditoleransi.

5. Perlu ditingkatkan kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan, pemerintah, badan pengatur, dan masyarakat sipil. Hanya dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa penggunaan dan penafsiran klausula baku dalam perjanjian jual beli mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen. Ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ansori, Ade Nasihudin. "Daftar Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan Yang Disita BPOM Jelang Lebaran 2024." <https://www.liputan6.com/health/read/5566408/daftar-kosmetik-tak-sesuai-ketentuan-yang-disita-bpom-jelang-lebaran-2024>.
- Arifiyana, Djamilah, Yosephine Sri Harjanti, and Tamara Gusti Ebtavanny. "Analisis Kuantitatif Hidrokuinon Pada Produk Kosmetik Krim Pemutih Yang Beredar Di Wilayah Surabaya Pusat Dan Surabaya Utara Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis." *Akta Kimia Indonesia* 4, no. 2 (2019).
- Fahira, Syarah Megianti, Agus Dwi Ananto, and Wahida Hajri. "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Pemutih Yang Beredar Di Beberapa Papasar Kota Mataram Dengan Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel." *Spin Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia* 3, no. 1 (2021).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Indriaty, Sulistiorini, Nur Rahmi Hidayati, and Arsyad Bachtiar. "Bahaya Kosmetika Pemutih Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika Di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon." *Jurnal Surya Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 8–11.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- . *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Khasanah, Mufidatul, and Adi Suliantoro. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di BPOM Semarang." *Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2020): 29–35.
- KM, Artikel. "Mengenal Informasi, Label Dan Izin Edar Kosmetika." <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-informasi-label-dan-izin-edar-kosmetika>.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lestari, Diah Ayu. "Manfaat, Bahaya, Dan Tips Pemakaian Hydroquinone." <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/krim-wajah-hydroquinone-adalah/>.
- Maulan, Teuku Raja. "Video - Viral Kisah Wanita Berwajah Gosong Gegara Pakai Skincare Merkuri, Dituding Kena Azab." <https://aceh.tribunnews.com/2023/09/07/video-viral-kisah-wanita-berwajah-gosong-gegara-pakai-skincare-merkuri-dituding-kena-azab>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Putri, Ayu Ristianing, and Misni Nur Wahyudiani. "Analisis Kadar Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Toko Online Dengan Metode Spektrofotometri." *Jurnal sosial dan sains* 1, no. 11 (2021): 1–464.

- RI, Permenkes. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam*, 2023.
- Rumagit, Jennifer Oktavina. “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya.” *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Safitri, Anggi, Zainab Ompu Jainah, and Okta Ainita. “Criminal Responsibility for Perpetrators of the Crime of Distributing Illegal Beauty Products Without Permission from the Drug and Food Control Agency (Study Decision Number 418/Pid. Sus/2023/PN Tjk).” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 217–233.
- Sanjaya, Yefta Christopherus Asia, and Inten Esti Pratiwi. “BPOM Temukan 5.937 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Awal 2024.” <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/17/183000865/Bpom-Temukan-5937-Kosmetik-Mengandung-Bahan-Berbahaya-Pada-Awal-2024?Page=all>.
- Sari, Ayu Nirmala, Ridwan Saputra, and Dhiyaul Falah. “Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Wajah Mahasiswi Biologi.” In *Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi Dan Kependidikan*, 10:126–130, 2022.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Simaremare, Eva Susanty. “Analisis Merkuri Dan Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Jayapura.” *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)* 8, no. 1 (2019): 1–11.